KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Awasi program MBG untuk cegah pungli
Tanggal : Rabu, 08 Januari 2025
Surat Kabar : Pikiran Rakyat
Halaman : 9

Awasi Program MBG untuk Cegah Pungli

JAKARTA, (PR).-
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diawasi secara ketat. Tujuannya, untuk menghindari kasus yang terjadi pada beberapa waktu lalu, saat ada sekolah meminta pungutan atas wadah makan.

Menurut dia, sekolah tersebut meminta uang sebesar Rp 30.000 untuk pembelian wadah makan terkait program MBG. Parahnya, setiap anak wajib membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai Rp 60.000.

Cucun mendapatkan dugaan pungli berdasarkan informasi dari rekaman video.

"Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparansi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Dia mengatakan, pemerintah telah menegaskan bahwa program MBG tidak memungut biaya tambahan.

Oleh karena itu, pengawasan yang ketat harus dilakukan. Tujuannya, mencegah oknum-oknum tak bertanggung jawab mencari keuntungan dengan memanfaatkan program MBG.

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, lanjut Cucun, diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana, dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.

Dia juga mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada orangtua murid. Harapannya, agar masyarakat memahami bahwa program MBG sepenuhnya ditanggung negara. Untuk itu, dia meminta ada sanksi tegas yang diberikan jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya.

"Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan penggadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat," kata Cucun.

Libatkan UMKM

Sementara itu, Pengamat Koperasi Suroto mengusulkan agar program strategis MBG yang secara resmi telah dimulai pada Senin (6/1/2025), dapat melibatkan masyarakat. Khususnya, pelaku usaha mikro dan kecil agar dampak ekonomi program ini turut dirasakan di level bawah.

"Usaha mikro dan kecil itu selama ini sudah ada di sektor pangan, dari pertanian pangan sampai dengan usaha kuliner. Program ini jangan hanya jadikan mereka (pelaku usaha mikro dan kecil) sebagai penonton," ujar Suroto, di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Dia juga berharap agar program ini dapat melibatkan masyarakat secara luas baik itu yang tergabung dengan koperasi maupun tidak. "Yang penting pastikan saja kantin sekolah itu jadi koperasi sebagai *hub* yang jalankan fungsi penyediaan makanannya," ujarnya menambahkan. **(Huminca)***